

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang

Kemiskinan dipandang sebagai permasalahan yang terus menjadi sorotan utama oleh semua negara apalagi bagi negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Pembangunan di negara berkembang tidak hanya mengejar peningkatan ekonomi semata, namun juga bertujuan untuk mendistribusikan kesejahteraan secara merata. Salah satu tujuan utama adalah melibatkan masyarakat di daerah terpencil yang selama ini kurang diperhatikan dalam pembangunan, agar mereka dapat ikut serta menikmati hasil-hasil pembangunan. Munculnya masalah kemiskinan disebabkan oleh adanya sebagian orang yang masih tergolong dalam kategori tidak mampu dalam mengatur tatanan kehidupannya untuk mencapai taraf yang manusiawi (Purnama, 2017).

Secara nasional, tingkat kemiskinan di Indonesia membaik secara bertahap. Badan Pusat Statistik (BPS) 2023 mencatat persentase angka penduduk miskin pada Maret 2023 yaitu 9,36 persen yang terlihat lebih kecil dari tahun sebelumnya pada bulan September 2022 sebesar persen. Namun, Indonesia masih merupakan negara yang memiliki angka kemiskinan relatif tinggi padahal beberapa tahun terakhir angka kemiskinannya terus menurun. Dilansir dari data Badan Pusat Statistik (BPS), terdapat provinsi di Indonesia dengan persentase penduduk miskin sangat tinggi, yaitu Nusa Tenggara Timur dengan persentase penduduk miskinnya sebesar 19,96 di bulan Maret tahun 2023, disusul oleh Provinsi Papua barat dengan 20,49 dan Papua dengan persentase penduduk miskin tertinggi mencapai 26,03.

Meskipun demikian, Pulau Jawa merupakan wilayah pusat pembangunan ekonomi. Faktor penting yang menjadi keunggulan di Pulau Jawa adalah kekayaan alam, potensi tenaga kerja muda yang terampil, pasar domestik yang tumbuh pesat, dan kondisi prasarana dan sarana yang berjangka panjang (Sulistiawan, 2023). Apabila dibandingkan dengan wilayah Indonesia bagian timur dan tengah yang punya kekayaan alam luas dan kaya, pulau jawa masih lebih unggul dalam kontribusi terhadap perekonomian Indonesia. (Mahroji dan Nurhasanah, 2019).

Oleh karena itu, Pulau Jawa menjadi fokus utama karena masih banyaknya permasalahan yang perlu untuk dibenahi, ditandai dengan tingkat kemiskinan di sana masih terbilang tinggi.

Tabel 1.1 Persentase Penduduk Miskin menurut Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2020-2023 (Persen)

Provinsi	Penduduk Miskin (Persen)			
	2020	2021	2022	2023
DKI Jakarta	4,69	4,67	4,61	4,44
Jawa Barat	8,43	7,79	7,98	7,62
Jawa Tengah	11,84	11,25	10,98	10,77
DI Yogyakarta	12,8	11,91	11,49	11,4
Jawa Timur	11,46	10,59	10,49	10,35
Banten	6,63	6,5	6,24	6,17

(Sumber: Badan Pusat Statistik 2023)

Mengacu pada data yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2023, provinsi dengan peringkat tertinggi angka kemiskinannya di Pulau Jawa yaitu Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Walaupun angka kemiskinan di provinsi tersebut terus menurun dari tahun 2020 hingga 2023, tetap saja DIY merupakan provinsi di Pulau Jawa yang menghadapi kemiskinan paling tinggi. Meskipun sangat terkenal dengan wisata, kuliner dan pendidikannya, provinsi angka kemiskinan di DIY masih lebih tinggi daripada rata-rata provinsi di Pulau Jawa (Putra dan Suharto, 2024).

Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) memiliki keunikan dari segi sosial dan kebudayaannya yang sesuai dengan gelar istimewa dari provinsi ini, akan tetapi semua itu belum cukup untuk menekan kemiskinan di DIY. Masyarakat yang masih kental dengan kebudayaannya sampai saat itu menganut filosofi *nrimo ing pandum* yang mengandung ajaran yang menekankan pentingnya menghargai segala nikmat yang telah diberikan dan menerima keadaan tanpa mengeluh atau berharap lebih, tidak tamak dan menerima sepenuhnya apa yang telah diberikan oleh kehidupan (Rakhmawati, 2022). Filosofi ini sudah mengakar dalam masyarakat sehingga

berdampak pada pola konsumsi masyarakat yang seadanya dan tidak berlebihan apalagi didukung dengan masih banyaknya sumber daya alam yang tersedia yang dapat dimanfaatkan dalam memenuhi kebutuhan hidup.

Pola konsumsi masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta yang cenderung irit menjadi salah satu faktor utama rendahnya upah minimum di wilayah ini. Upah murah yang diterima masyarakat sejalan dengan biaya hidup yang juga rendah. Kenaikan upah minimum provinsi 2023 seharusnya mendorong peningkatan konsumsi, namun ini tidak terjadi di DIY. Hal ini menunjukkan bahwa pola konsumsi yang sederhana telah menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat DIY, sehingga kenaikan upah tidak serta-merta meningkatkan daya beli secara signifikan (Bank Indonesia, 2024).

Berdasarkan data yang disajikan oleh Badan Pusat Statistik pada tahun 2023, Pemerintah Daerah DIY menetapkan upah minimum provinsi di angka Rp. 1.981.782 per bulan. Meskipun naik sebesar 7,65 persen apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, angka tersebut masih menjadi yang terendah kedua jika dibandingkan dengan provinsi-provinsi di Indonesia. Daerah Istimewa Yogyakarta hanya lebih unggul dari Jawa Tengah dengan upah minimum Rp. 1.958.169. Besaran upah minimum harus disesuaikan dengan peningkatan biaya hidup yang terjadi seiring berjalannya waktu. sehingga para pekerja mampu memenuhi kebutuhan pokok dan hidup dengan layak. Hal ini berkaitan dengan pola konsumsi masyarakat yang masih menganut falsafah *nrimo ing pandum*. Artinya, besarnya tingkat upah minimum tidak dapat tercapai jika upah minimum masih terlalu rendah untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Upah rendah seringkali menjadi penyebab utama rendahnya minat masyarakat untuk bekerja pada suatu pekerjaan tertentu. Namun, keterbatasan lapangan pekerjaan mengharuskan seseorang untuk bekerja di pekerjaan tertentu meskipun upah yang diterima tidak sesuai dengan target yang diinginkan. Hal ini menandakan bahwa pekerjaan tersebut merupakan satu-satunya pilihan yang tersedia dengan upah yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan pilihan pekerjaan lainnya meskipun masih tergolong pada kategori rendah jika dilihat dari upah minimum di provinsi tersebut (Tridiana dan Widyawati, 2018). Hal ini juga dapat dikaitkan dengan filosofi yang dianut oleh masyarakat DIY, dimana ketika seseorang

dihadapkan dengan pilihan pekerjaan yang terbatas dan upah yang rendah, filosofi *nrimo ing pandum* ini dapat mendorong orang tersebut untuk menerima kondisi ini dengan berpikir tidak ada pilihan lain yang lebih baik dan berusaha untuk mensyukuri dengan apa yang ada.

Tingkat pengangguran yang rendah akan mempengaruhi rendahnya tingkat kemiskinan. Namun, rendahnya tingkat pengangguran tidak serta-merta menjamin peningkatan kesejahteraan masyarakat. Banyak pekerja terutama di sektor informal, masih hidup dalam kemiskinan karena pendapatan yang mereka terima tidak memadai untuk menunjang kehidupan sehari-hari (Krisnawati et al., 2018). Dilansir dari data yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik DIY pada tahun 2023, persentase tenaga kerja informalnya lebih tinggi jika dibandingkan dengan persentase tenaga kerja formalnya. Persentase tenaga kerja informal pada tahun 2023 yaitu 53,78 sedangkan untuk pekerja formal persentasenya di tahun yang sama yaitu 46,22. Meskipun sektor informal dapat menyerap banyak tenaga kerja, belum tentu dapat memberi solusi yang efektif dalam mengurangi kemiskinan. Rendahnya upah pada sektor informal sering membuat pekerja terperangkap dalam lingkaran kemiskinan (Sari dan Putri, 2022).

Tingkat kemiskinan tidak hanya dipengaruhi oleh satu faktor, tetapi juga oleh indeks pembangunan manusia yang mencerminkan kualitas hidup masyarakat. Kualitas indeks pembangunan manusia mempengaruhi penyerapan tenaga kerja. Seperti yang dijelaskan pada teori *human capital*, dimana selain membuat hidup lebih sehat dan berkualitas, investasi di pendidikan dan kesehatan, tetapi juga merupakan investasi yang sangat menguntungkan bagi perekonomian. Investasi pada peningkatan kualitas dan kuantitas output tenaga kerja merupakan langkah cerdas dalam memaksimalkan potensi pertumbuhan ekonomi dan menciptakan kesejahteraan masyarakat (Safitri dan Desmintari, 2022). Kualitas indeks pembangunan manusia di Provinsi DIY tidak termasuk yang tertinggi di Pulau Jawa, namun juga tidak menempati posisi paling rendah dengan angka 81,07 pada tahun 2023 yang hanya lebih unggul dari Provinsi Banten di angka 73,87 namun berada dibawah DKI Jakarta yaitu dengan IPM 82,6.

Meskipun demikian, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) di setiap tahunnya terus meningkat dalam beberapa

tahun terakhir. Ukuran pembangunan manusia Provinsi DIY yang terus meningkat juga diiringi oleh kemiskinan yang menurun setiap tahunnya. Seharusnya peningkatan tersebut dapat meningkatkan produktivitas masyarakat dan menekan tingkat kemiskinan yang ada. Namun pada kenyataannya, peningkatan ini belum dapat menekan tingkat kemiskinan secara efektif. Meskipun IPM mengalami peningkatan, kemiskinan masih menjadi masalah yang terus terjadi di DIY. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan taraf hidup masyarakat sejahtera yang diupayakan oleh pemerintah tidak sejalan dengan tujuan pembangunan yang ditetapkan.

Berdasarkan data dan informasi yang diperoleh dari pengamatan terhadap fenomena yang sudah terjadi, penelitian lebih mendalam perlu untuk dilakukan untuk mengetahui penyebab terjadinya kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Maka dari itu, peneliti tertarik untuk mengambil judul **“Analisis Pengaruh Upah Minimum Kabupaten/kota, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap Kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta”**

## **1.2. Rumusan Masalah**

Mengacu pada permasalahan yang telah diidentifikasi sebelumnya, pertanyaan utama dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana pengaruh upah minimum kabupaten/kota terhadap kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)?
2. Bagaimana pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)?
3. Bagaimana pengaruh tingkat pengangguran terbuka terhadap kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)?

## **1.3. Tujuan Utama Penelitian**

Mengacu pada permasalahan yang telah diidentifikasi, tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk menganalisis pengaruh upah minimum kabupaten/kota terhadap kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

2. Untuk menganalisis pengaruh dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).
3. Untuk menganalisis pengaruh tingkat pengangguran terbuka terhadap kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

